



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Nomor : 000.7.6.4/0602/300.05

TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
TAHUN 2026



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor: 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - gg. Kecamatan Palaran;
 - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
 - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Kecamatan Sambutan; dan
 - nn. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan
 - c. Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 FAX. (0541) 741429

S A M A R I N D A – K A L I M A N T A N T I M U R

Kode Pos : 7 5 1 2 1

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
NOMOR : 100.3.3.3/0065-SK/300.05

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2025;
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Agustus Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026, dengan susunan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dicantum Pertama mempunyai tugas :


1. Menyusun draft Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
2. Melakukan Evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan sebagai bahan penetapan kinerja pada tahun beikutnya;
3. Menyusun data-data Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dikompilasi sebagai bahan SIPD pada tahun selanjutnya;

- KETIGA : Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tim memperhatikan arah dan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang terintegrasi dengan RPJMD Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 3 Oktober 2025

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda,




YOSUA LADEN. S.STP..M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda Nomor : 100.3.3.3/0065-SK/300.05 Tanggal 3 Oktober 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Sekretariat		
3.	Jafung Perencana Ahli Muda	Koordinator
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Koordinator
5.	Pelaksana Sekretariat	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan		
6.	Kepala Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Koordinator
7.	Jafung Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator
8.	Pelaksana Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Politik Dalam Negeri		
9.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Koordinator
10.	Jafung Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator
11.	Pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat		
12.	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Koordinator
13.	Jafung Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator
14.	Pelaksana Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Anggota

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional		
10.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	Koordinator
11.	Jafung Perencana Ahli Muda	Sub Koordinator
12.	Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional	Anggota

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda,



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia dari Allah SWT sehingga Rencana Kerja (RENJA) yang memuat Program-program dan Kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Dalam pelaksanaan Program-program dan Kegiatan-kegiatan diperlukan perencanaan dan penyusunan anggaran yang tepat dan sesuai sasaran sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan akan berjalan sesuai harapan.

Kaitan dengan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan hendaknya ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan yang riil.

Pembuatan Rencana Kerja (RENJA) ini sudah menjadi keharusan/kewajiban setiap SKPD dimana nantinya akan menjadi bahan untuk mengikuti MUSRENBANG.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Samarinda, 3 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda,



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si

NIP. 19830525 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	38
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya PD ..	43
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	65
3.3. Program dan Kegiatan	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	77
BAB V PENUTUP	
5.1. Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan	97
5.2. Kaidah-kaidan Pelaksanaan	98
5.3. Rencana Tindak Lanjut	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2026 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Saamarinda dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.



Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menyusun Dokumen Renja 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.



1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta memperhatikan Renja K/L. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan usulan program. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini akan digunakan sebagai proses penyusunan RAPBD tahun 2026. Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda ini juga mengacu pada Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

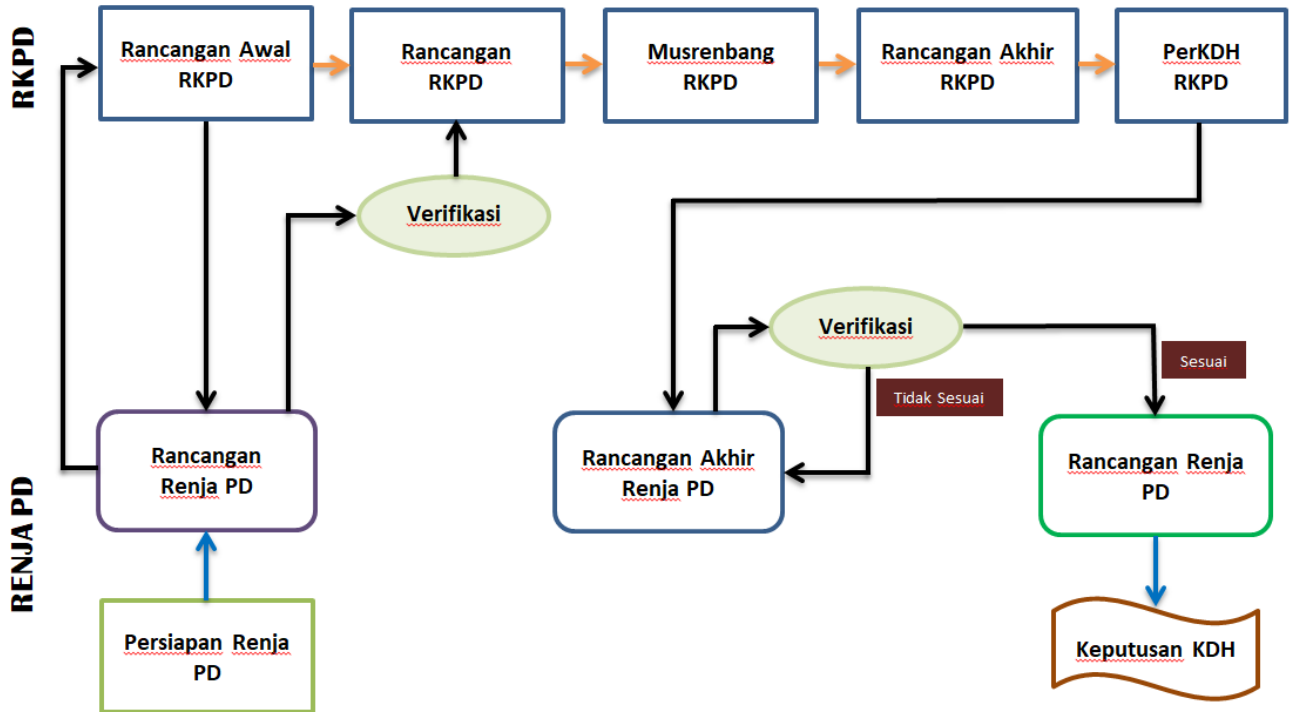
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

Dibawah ini bagan alur tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah :



ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PD



Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan OPD Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja, adalah sebagai berikut:

- Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kegiatan yang simultan (bersamaan) dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

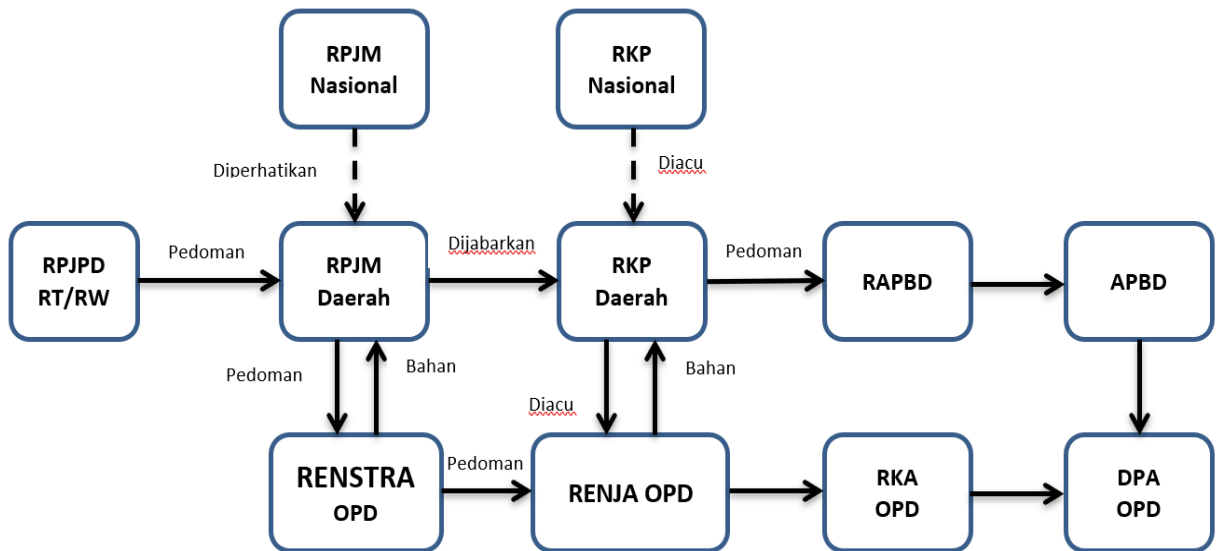


- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian Lembaga dan Renja Pemerintah Kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :

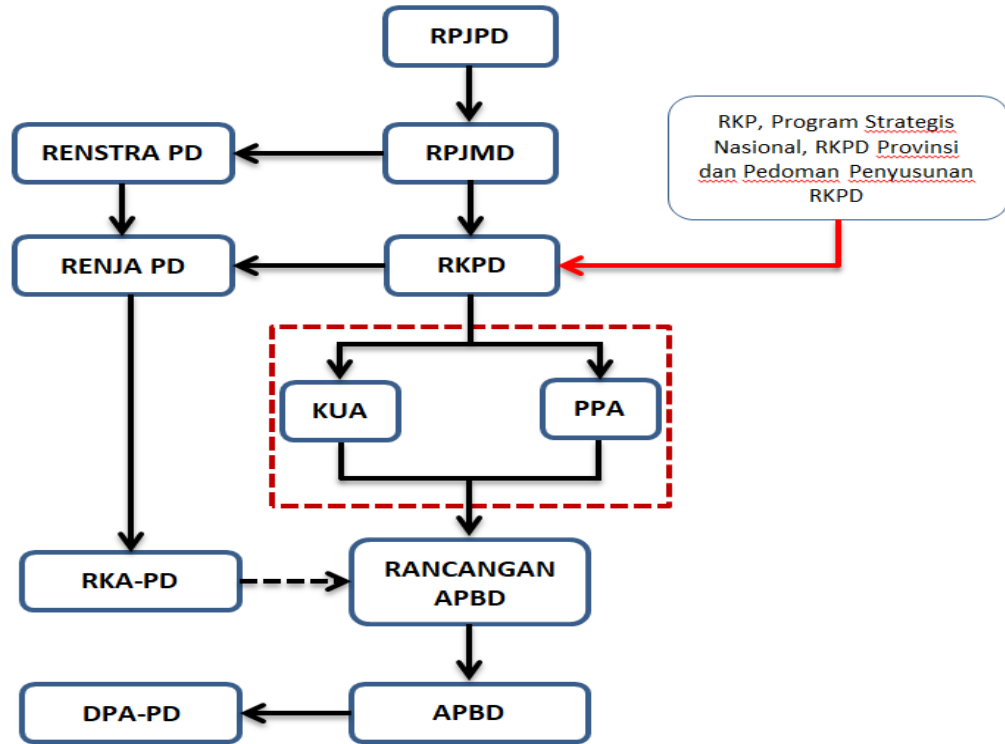
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD



Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :



Tindak Lanjut Renja dalam proses penyusunan RAPBD



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda di susun atas dasar undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;



23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2025;
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Agustus Tahun 2025;
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September Tahun 2025;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
2. Bahan evaluasi untuk program dan kegiatan tahun berikutnya.
3. Tersusunnya program dan kegiatan sebagai bahan Rencana Kinerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat



Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.3 Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
(Sustainable Development Goals);



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
 4. Lampirkan Tabel T-C.31
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi dan Misi adalah Visi dan Misi RPJMD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan tahun 2026.

Tabel T-C. 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat data bisa di peroleh dari Laporan Renja di SIPD-RI melalui akun Kepala Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp. **101.712.616.935.-** (*seratus satu milyar tujuh ratus dua belas*



juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar 96,85% atau sebesar Rp. **98.511.998.464,-** (*sembilan puluh delapan milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2024 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 96,85%. dari jumlah dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda hampir semua target indikator kinerja sebagian besar dapat tercapai, meskipun terdapat juga penyerapan anggarannya belum maksimal.

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 yang telah **memenuhi target kinerja** hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

- 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 1200 orang dari target 1200 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 88,34%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.405.751.600,- dan realisasi anggaran Rp. 1.241.785.401,-
 - 2) Pembentukan Paskibraka.



Capaian kinerja sub kegiatan ini 300 orang dari target 300 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 89,42%. Dengan jumlah anggaran Rp. 2.380.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.128.207.059,-

3) Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 4 dokumen dari target 4 dokumen. Anggaran yang dicapai dengan persentase 75%. Dengan jumlah anggaran Rp. 100.680.000,- dan realisasi anggaran Rp. 75.460.000,-

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan yaitu :

1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Capaian kinerja sub kegiatan ini 10 dokumen dari target 10 dokumen. Anggaran yang dicapai dengan persentase 99,17%. Dengan jumlah anggaran Rp. 62.811.729.387,- dan realisasi anggaran Rp. 62.293.508.954,-

2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Capaian kinerja sub kegiatan ini 12 laporan dari target 12 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 80,84%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.542.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.246.523.377,-



3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Capaian kinerja sub kegiatan ini 600 orang dari target 600 orang atau 100%. Anggaran yang dicapai dengan persentase 51,82%. Dengan jumlah anggaran Rp. 420.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 217.661.220,-, hal ini dikarenakan adanya waktu pelaksanaan kegiatan yang mendekati akhir tahun sehingga penyesuaian jadwal tidak terlaksana secara maksimal.
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Capaian kinerja sub kegiatan ini 25 laporan dari target 25 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 97,10%. Dengan jumlah anggaran Rp. 48.600.000,- dan realisasi anggaran Rp. 47.192.450,-
 - 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan sub kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Capaian kinerja sub kegiatan ini 600 orang dari target 600 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 85,64%. Dengan jumlah anggaran Rp. 173.950.000,- dan realisasi anggaran Rp. 148.971.900,-



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Capaian kinerja sub kegiatan ini 25 laporan dari target 25 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 85,64%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.470.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.376.659.355,-

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Capaian kinerja sub kegiatan ini 1000 orang dari target 1000 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 96,03%. Dengan jumlah anggaran Rp. 664.882.500,- dan realisasi anggaran Rp. 638.505.534,-

- 2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan ini 12 laporan dari target 12 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 98,62%. Dengan jumlah anggaran Rp. 16.437.770.448,- dan realisasi anggaran Rp. 16.211.468.178,-.

Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor penyebab tdk tercapai/ tercapai/ melebihi target	Solusi/Tindak Lanjut
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	100%	100%	100%	Target Tercapai 1. Adanya strategi untuk melibatkan lebih banyak komunitas dan organisasi masyarakat dalam program sosialisasi Pancasila. 2. Adanya metode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif sesuai dengan kebutuhan sasaran (Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat). 3. Mengajak tokoh masyarakat, Tokoh agama, atau publik	1. Menyusun program sosialisasi Pancasila yang terstruktur dan terencana dengan baik. 2. Menyusun program pendidikan berkelanjutan yang menjangkau berbagai tingkat pendidikan dan kelompok masyarakat untuk memperkuat pemahaman Pancasila.
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	1000 orang	1000 orang	100%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pancasila dan Karakter Kebangsaan				figur untuk terlibat dan mengajak partisipasi dalam program sosialisasi. 4. Bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan. 5. Mengadakan forum dialog secara berkala dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan perwakilan berbagai kelompok masyarakat dan pelajar.	3. Menyesuaikan materi sosialisasi dengan isu-isu terkini dan kebutuhan audiens agar lebih relevan dan menarik bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 orang	1200 Orang	100%	Target Tercapai 1. Penguatan Informasi dan Komunikasi 2. Pengembangan Program Menarik 3. Memastikan aksesibilitas kegiatan sosialisasi dengan mengadakan acara di berbagai lokasi 4. Pengembangan Materi Edukasi 5. Bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan.	Pembentukan Organisasi Masyarakat: • Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) • Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) • Forum Jejaring Panca Mandala (JPM)
Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Target Tercapai 1. Menyediakan panduan dan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan program sosialisasi agar pelaksana memiliki acuan yang tepat Pelatihan berkala terhadap penggunaan sumber daya manusia untuk kebutuhan program	1. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan adanya sinkronisasi dan pembaruan informasi 2. Mengelola sumber daya dengan bijaksana untuk memaksimalkan hasil program dengan anggaran yang tersedia. 3. Menyusun anggaran yang efisien dan terperinci dengan mempertimbangkan prioritas program dan kebutuhan
Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	300 Orang	300 Orang	100%	Target Tercapai Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pelaksana, termasuk pelatihan mengenai metodologi sosialisasi dan komunikasi efektif	Pelatihan berkala terhadap penggunaan sumber daya manusia untuk kebutuhan kegiatan
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	85,99%	85,99%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1000 Orang	1000 Orang	100%	Target Tercapai 1. Koordinasi Dengan OPD Terkait, Seperti Kecamatan dan Kelurahan 2. Sosialisasi pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilu dan proses pemilihan. 3. Sosialisasi Program Kegiatan Terhadap PAM TPS. 4. Bekerjasama dengan aparat keamanan, seperti polisi dan TNI, untuk mengawasi dan melindungi tempat pemungutan suara dan infrastruktur pemilu. 5. Adanya Kolaborasi dengan Sekolah dan Universitas	1. Menyusun dan melaksanakan program pendidikan politik yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. 2. Menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi untuk mempromosikan kegiatan pendidikan politik dan mengajak partisipasi. 3. Pengembangan Materi yang Relevan
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	Target Tercapai Penyusunan anggaran program sesuai kebutuhan	1. Melakukan pelaporan rutin mengenai situasi politik kepada pimpinan untuk memastikan informasi yang relevan disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	12 laporan	12 laporan	100%	Target Tercapai 1. Rapat Koordinasi Berkala 2. Dibentuknya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan bersama agar semua lembaga dapat merencanakan dan menyesuaikan jadwal mereka dengan baik. 2. Meningkatkan Koordinasi Dengan OPD Terkait, Seperti Kecamatan dan Kelurahan



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

	Situasi Politik di Daerah					
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	100%	100%	100%	Target Tercapai 1. Sosialisasi dan Pembinaan untuk Ormas / LSM / OKP 2. Pelatihan - pelatihan tentang kegiatan yang bisa dilakukan bagi ormas itu sendiri 3. Penyuluhan dan kegiatan ke Ormas supaya ada ketertarikan mereka untuk ikut peran serta dalam ke Organisasi Kemasyarakatan	1. Mengimbu dan menyarankan bagi seluruh Ormas untuk mendaftar dan melapor keberadaan Organisasi kemasyarakatannya supaya bisa terdata dan tercatat oleh Pemerintah/Badan Kesbangpol Kota Samarinda 2. Menerapkan istilah jemput bola dan memberi arahan kepada Ormas-ormas yang ada
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	25 Ormas	25 Ormas	100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 orang	600 Orang	100%	Target Tercapai 1. Penyuluhan tentang dasar hukum Ormas, Perbup No.24 Tahun 2022 tentang pendaftaran ormas dan pelaporan ormas 2. Pertemuan rutin antar ormas untuk memastikan koordinasi yang efektif dan mengatasi hambatan yang muncul. 3. Pembentukan TIM untuk bisa terjun langsung kelapangan untuk mendata ormas	1. Mengadakan pelatihan - pelatihan atau bimtek untuk lebih kenal dan memahami tentang tata cara yang lebih efektif 2. Meningkatkan Koordinasi Dengan Organisasi Kemasyarakatan 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pengawasan ormas
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 laporan	25 laporan	100%	Target Tercapai 1. Penyuluhan tentang dasar hukum Ormas, Perbup No.24 Tahun 2022 tentang pendaftaran ormas dan pelaporan ormas 2. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan untuk Ormas / LSM / OKP	1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Organisasi Kemasyarakatan 2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pengawasan ormas
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	100%	100%	100%	Target Tercapai 1. Sosialisasi yang di buat semenarik mungkin dengan mengundang para pelaku ekonomi UMKM khususnya yang bisa menaikkan minat dan bakat dan memberikan kesempatan untuk pengenalan produk yang mereka buat 2. Sosialisasi dan koordinasi kepada OPD terkait jadwal rapat dan kegiatan 3. Sosialisasi tentang pemahaman kepada masyarakat umum khususnya sehingga dapat memahami peraturan dan regulasi dan ketentuan yang sudah ada di	1. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat umum 2. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan sosial budaya yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum 3. Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk pelaksana, termasuk pelatihan mengenai regulasi tempat ibadah
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40 laporan	40 laporan	100%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

					tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 orang	600 Orang	100%	Target Tercapai 1. Penguatan Informasi dan Komunikasi 2. Pengembangan Program Menarik 3. Memastikan aksesibilitas kegiatan sosialisasi dengan mengadakan acara di berbagai lokasi 4. Pengembangan Materi Edukasi	1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan bersama agar semua lembaga dapat merencanakan dan menyesuaikan jadwal mereka dengan baik. 2. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan sosial budaya yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 laporan	25 laporan	100%	Target Tercapai 1. Penyusunan jadwal koordinasi antar pihak terkait adwal rapat dan kegiatan 2. Membuat Kegiatan yang tidak selalu monoton di setiap pelaksanaanya	1. Mengadakan Rapat Rutin antar Pihak terkait untuk membahas bersama, merencanakan kegiatan, dan menyamakan tujuan. 2. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan sosial budaya yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Target Tercapai 1. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendeteksi dan menangani potensi konflik. 2. Pelatihan SDM Terhadap Program Deteksi Dini Rawan Konflik	1. Menyusun dan melaksanakan program pencegahan konflik sosial yang mencakup edukasi tentang toleransi, resolusi konflik, dan penanganan perbedaan. 2. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi tanda-tanda awal potensi konflik sosial, seperti peningkatan ketegangan atau isu-isu sensitif yang muncul di masyarakat 3. Memanfaatkan Media Sosial Untuk Monitoring Potensi Konflik 4. Menyusun Peta Rawan Konflik
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 kasus	24 kasus	100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	1000 orang	1000 Orang	100%	Target Tercapai 1. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan perwakilan dari Setiap Instansi Terkait dengan menyelesaikan konflik sosial yang ada	1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan 2. Melaksanakan program edukasi yang



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2. Pelatihan kepada staf tentang teknik pengumpulan data yang akurat dan metode analisis untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.	menjelaskan manfaat partisipasi dalam kegiatan kewaspadaan nasional dan dampaknya terhadap masyarakat.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100%	Target Tercapai 1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan	3. Mengadakan forum koordinasi rutin antara lembaga untuk membahas isu-isu bersama, merencanakan kegiatan, dan menyelaraskan tujuan

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

- 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
Capaian kinerja sub kegiatan ini 5 laporan dari target 8 dokumen. Anggaran yang dicapai dengan persentase 49,14%. Dengan jumlah anggaran Rp. 112.180.000,- dan realisasi anggaran Rp. 55.123.200,-
 - 2) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
Capaian kinerja sub kegiatan ini 0 orang dari target 44 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 0%. Dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 0,-
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 8459 orang dari target 10000 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 91,45%. Dengan jumlah anggaran Rp. 13.914.843.000,- dan realisasi anggaran Rp. 12.725.562.836,-

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 Capaian kinerja sub kegiatan ini 11 laporan dari target 14 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 80,91%. Dengan jumlah anggaran Rp. 130.230.000,- dan realisasi anggaran Rp. 105.369.000,-.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor penyebab tdk tercapai/ tercapai/ melebihi target	Solusi/Tindak Lanjut
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	100%	100%	100%		
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000 orang	1000 orang	100%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 laporan	5 laporan	63%	Tidak Tercapai 1. Luasnya jangkauan internet dan media sosial membuat pemantauan konten yang menyebarkan ideologi radikal menjadi sangat sulit. 2. Kurangnya Partisipasi terhadap Program Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	1. Mengadakan kampanye publik yang kreatif dan menarik melalui media massa dan media sosial untuk melawan ideologi radikal dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. 2. Menyusun program pendidikan berkelanjutan yang menasar berbagai tingkat pendidikan dan kelompok masyarakat untuk memperkuat pemahaman Pancasila.
Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	44 Orang	0%	0%	Tidak Tercapai Jadwal pelaksanaan mendekati akhir tahun	Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan adanya sinkronisasi dan pembaruan informasi.
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	85,99%	85,99%	Tidak Tercapai 1. Kurangnya Pelatih, terbatasnya Staf 2. Terbatasnya dana yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh. 3. Jangkauan Luasan Daerah Yang di Monitoring terlalu luas 4. Kurangnya minat masyarakat yang membentuk organisasi untuk mendaftar atau melapor ke Badan Kesbangpol Kota Samarinda	1. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa dalam program pendidikan politik 2. Melakukan Kegiatan Sosialisasi yang di buat semenarik mungkin dengan mengundang para pelaku ekonomi umkm khususnya yang bisa menaikkan minat dan bakat dan memberikan kesempatan untuk pengenalan produk yang mereka buat
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1000 Orang	1000 Orang	100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan	10000 orang	8459 orang	84,59%	Tidak Tercapai 1. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat, Pelajar, dan Mahasiswa	1. Pelatihan berkala terhadap penggunaan sumber daya manusia untuk kebutuhan program.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				terhadap pendidikan politik 2. Jadwal yang Bertabrakan 3. Kurangnya motivasi terhadap proses pemilu dapat mengurangi partisipasi masyarakat.	2. Mengembangkan Sosialisasi pemilu yang lebih agresif dan kreatif, menggunakan media sosial, iklan, dan acara komunitas untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran tentang pemilu. 3. Melibatkan tokoh masyarakat, influencer, mempromosikan partisipasi dalam pemilu dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. 4. Meningkatkan promosi dan sosialisasi program pendidikan politik melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, radio, televisi, dan Baleho, serta dengan melibatkan influencer atau tokoh masyarakat.
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 kasus	24 kasus	100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 laporan	11 laporan	78,57%	Tidak Tercapai 1. Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai kegiatan 2. Tidak adanya koordinasi yang efektif antara OPD dengan lembaga lain yang relevan. 3. Metode pengumpulan data yang tidak efektif.	1. Memanfaatkan Media Sosial Untuk Moonitoring Potensi Konflik 2. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan



2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Setelah ada penyesuaian target dan anggaran tentunya akan ada implikasi pada pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja maupun Rencana Strategis.

Namun pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditangani oleh bidang teknis dampak atau implikasinya akan jauh terasa. Pada tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa mengakomodir target kinerja sesuai dokumen Renstra maupun dokumen Renja karena beberapa faktor alasan, dan umumnya karena disebabkan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sehingga mengharuskan adanya penyesuaian target dan anggaran pelaksanaan kegiatan, ditambah lagi ada rasionalisasi anggaran yang menyebabkan semua PD dilingkup Pemerintah Kota Samarinda dipotong anggaran belanja satuan kerjanya, yang tentunya hal ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen Renstra maupun di dalam Renja PD.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

- a. Setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran ke dalam kegiatan (penyusunan rincian belanja).
- b. Ada komitmen dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada.



- c. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada PD, sering terjadi keadaan di PD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada PD oleh Pemerintah Kota jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh PD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

Tabel. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025

Tabel. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triw 4 Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah (PD) : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	11=(11/5)	12
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80	76,60	76,70	76,60	100%	76,80	240,90	2,87	Badan Kesbangpol Kota
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	80,70	80,20	80,40	80,20	100%	80,50	240,90	2,98	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	5	5	5	100%	5	15	0,75	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1	1	1	100%	1	3	0,75	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	1	100%	1	3	1,29	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	28	7	7	7	100%	7	21	0,75	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	260	65	65	65	100%	65	195	0,75	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	160	40	40	40	100%	40	120	0,75	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	20	5	5	5	100%	5	15	0,75	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang	420	105	105	105	100%	105	315	0,75	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	90	100	100	100%	100	290	0,70	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	0	20	20	100%	20	40	0,33	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	10	0	3	5	167%	5	10	0,30	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	20	5	5	5	100%	5	15	0,75	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	8	0	4	4	100%	4	8	0,50	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	1	4	400%	1	5	0,08	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Laporan	102	20	25	30	120%	25	75	0,56	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	7	0	3	3	100%	3	6	0,43	
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6	0	2	2	100%	2	4	0,33	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	24	0	1	12	1200%	1	13	0,04	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	0	12	12	100%	12	24	0,25	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	138	36	36	36	100%	36	108	0,78	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	40	10	10	10	100%	10	30	0,50	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	18	18	18	100%	18	54	0,75	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	1	1	1	100%	1	3	0,75	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3,00%	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	4400	700	1000	1000	100%	1200	2900	0,59	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	4494	700	1200	2125	177%	800	3625	0,71	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	39	12	8	8	100%	8	28	0,56	
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	13	0	4	4	100%	4	8	0,31	
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	900	0	300	444	148%	300	744	0,33	
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Orang	164	0	44	0	0%	40	40	0,27	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3,00%	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Orang	7200	3800	1000	1000	100%	1200	6000	0,70	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	40	10	10	10	100%	10	30	0,75	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	18575	2450	10000	8459	84,59%	250	11159	0,76	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	248	12	12	12	100%	12	36	0,90	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3,00%	Badan Kesbangpol Kota
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas yang dibina	Ormas	153	23	25	25	100%	45	93	0,39	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	2400	600	600	870	145%	600	2070	0,60	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	185	20	25	25	100%	50	95	0,32	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3,00%	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	165	35	40	40	100%	45	120	0,64	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2400	600	600	1050	175%	600	2250	0,48	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	108	35	25	25	100%	30	90	0,37	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3,00%	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	Kasus	96	24	24	24	100%	24	72	0,75	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	4750	750	1000	1158	115,80%	1500	3408	0,33	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	56	14	14	14	100%	14	42	0,89	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2025)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2025		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	48	11	12	12	100%	12	35	0,75	



Berdasarkan tabel 29 di atas yang menunjukkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 serta target dan realisasi tahun 2024 (tahun berjalan), terdapat indikator capaian 57 terdiri dari 6 program, 12 indikator kegiatan, dan 39 indikator sub kegiatan.

Ada 44 indikator kinerja pada tahun 2024 tercapai sesuai target kinerja dan 3 indikator capaian kinerja belum/tidak tercapai sesuai target. Sedangkan capaian kinerja tahun 2024 belum terealisasi 1 indikator capaian kinerja. Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan jadwal pelaksanaan terlalu mepet dengan akhir tahun sehingga penjadwalan dan koordinasi dengan beberapa lembaga-lembaga terkait sinkronisasi dan pembaruan informasi tidak terealisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan, dan kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga untuk menilai kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menilai berdasar capaian indikator program.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut.



Data yang disampaikan pada tabel diatas merupakan gambaran capaian realisasi terhadap satu sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda pada Tahun 2024. Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis sudah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan angka realisasi yang telah memenuhi target sasaran kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya yang termuat dalam RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 – 2029.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

Susunan organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekertaris
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi



Kemasyarakatan

- f. Bidang Politik Dalam Negeri
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)

- a. Kepala Badan

Membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri
- 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)
 - a) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - b) Jafung Perencana Ahli Muda
 - c) Jafung Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - d) Jafung Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
 - e) Jafung Ketahanan Seni dan Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - f) Jafung Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing dan Penanganan Konflik

- b. Sekretaris

membawahi :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 30 September 2025, memiliki jumlah pegawai sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 35 orang ASN, 4 orang PPPK, 13 orang PTTB, 11 orang PTTH, 2 orang petugas kebersihan, dan 1 orang security.

Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan dimasing-masing Bidang

No.	Bidang	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1 Orang
2.	Sekertariat	Sekertaris	1 Orang
		Subbag	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	22 Orang
3.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	0 Orang
		Staf	6 Orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	0 Orang
		Staf	8 Orang
5.	Bidang Ekososbud	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
Jumlah			63

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan mencapai 15,87% di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Berikut Tabel analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Terlampir : Tabel. 30)

Tabel 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	2	3	4	6	7	11	12	9	10	11	12
1	Hasil Penilaian Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda			80,4	80,6	80,6	80,7	70,75	0	80,6	80,7
2	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat			100%	100%	100%	100%	142,76%	0%	100%	100%
3	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik			100%	100%	100%	100%	85,99%	0%	100%	100%
4	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan			100%	100%	100%	100%	145,00%	0%	100%	100%
5	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan			100%	100%	100%	100%	175,00%	0%	100%	100%
6	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	115,80%	0%	100%	100%

Tabel 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	11	12	9	10	11	12	13
1	Hasil Penilaian Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda			80,4	80,6	80,6	80,7	70,75	0	80,6	80,7	Realisasi 2024 & 2025 Proyeksi 2026-2027 mencapai target
2	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat			100%	100%	100%	100%	142,76%	0%	100%	100%	
3	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik			100%	100%	100%	100%	85,99%	0%	100%	100%	
4	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan			100%	100%	100%	100%	145,00%	0%	100%	100%	
5	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan			100%	100%	100%	100%	175,00%	0%	100%	100%	
6	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	115,80%	0%	100%	100%	



Beberapa program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi beberapa faktor.

Pendidikan politik belum tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan penyelenggaraan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masih menggunakan metode sosialisasi formal berdasarkan ketersediaan anggaran. Idealnya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dapat dilaksanakan di tengah tengah kegiatan masyarakat sehari-hari baik melalui selebaran, siaran radio, keramaian pasar, penyampaian dalam upacara bendera di sekolah-sekolah, dan sebagainya. Resiko dari tidak tercapainya target Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, meningkatnya potensi konflik sosial, penyalahgunaan narkoba dan potensi tumbuhnya paham radikalisme, dan tidak tercapainya target IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV yang turut menyumbang dalam belum tercapainya target target dari kinerja.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

✚ Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tahun 2024 dapat di kategorikan “sangat baik”. Pencapaian Kinerja Pelayanan menunjukkan bahwa realisasi capaian sesuai target yang ditetapkan. Adapun identifikasi yang dilakukan mengenai hal-hal penting dan kritis yang terkait dengan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yakni :

1. Pembinaan ideologi, kerukunan, kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas dari segala ancaman, hal penting dan kritis yang dilaksanakan pada kegiatan terkait kinerja pelayanan yakni :
 - Rasa cinta tanah air
 - Pemahaman wawasan kebangsaan
 - Tingkat implementasi nilai-nilai pancasila



- Pembinaan kerukunan umat beragama
 - Pembinaan terhadap Ormas
 - Fanatisme kedaerahan
 - Tingkat penyalahgunaan/peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, tawuran pelajar, dan tawuran antar warga/kelompok
 - Tingkat keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini
2. Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi dan Peningkatan Partisipasi Pemilu, hal penting dan kritis yang dilaksanakan pada kegiatan terkait kinerja pelayanan yakni :
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam lembaga-lembaga demokrasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
 - Tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga demokrasi
 - Program pembinaan penguatan nilai-nilai demokrasi

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda antara lain :

1. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan
- Kurangnya implementasi nilai-nilai pancasila
- Masih adanya fanatisme kedaerahan

2. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Politik Dalam Negeri.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Masih kurangnya tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum



- Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam lembaga lembaga demokrasi
 - Kurangnya tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga lembaga demokrasi
 - Program pembinaan penguatan nilai-nilai demokrasi
3. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Masih kurangnya toleransi di masyarakat
 - Masih merebaknya penyalahgunaan/peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, tawuran pelajar, dan tawuran antar warga/kelompok.
 - Masih kurangnya program-program pembinaan kerukunan umat beragama
 - Masih kurangnya program-program pembinaan terhadap Ormas
4. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Kewaspadaan Nasional.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini

✚ Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah serta Capaian Program Nasional/Internasional

- Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepala Daerah Periode 2025 – 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi melaksanakan misi ke 3 yaitu : *“Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis”* dengan sasaran Meningkatkan Penguatan dan Pemahaman Ideologi



Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial.

- Dalam lingkup nasional, penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mendukung Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selaku pembina penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Visi dan Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah :

Visi : “Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik berdasarkan Pancasila”

Misi :

- Memperkuat Stabilitas Sosial dan Politik Dalam Negeri
- Penguatan Kehidupan yang Demokratis Berdasarkan Pancasila
- Penguatan Nilai-nilai Pancasila serta Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga turut mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kota Samarinda 2023-2026, khususnya pada indikator:
 - Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
 - Kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota

Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih kurang.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Adapun peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan sebagai berikut :

1. Dukungan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ORMAS, OKP, LSM serta mahasiswa dan pelajar dalam pelaksanaan pembinaan dibidang kesbangpol.
2. Adanya keterkaitan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2025 – 2029.
3. Terbentuknya Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengantisipasi kerawanan-kerawanan konflik sosial di masyarakat.
4. Terbentuknya Forum Wawasan Kebangsaan Kecamatan (FPK) sekota Samarinda.

✚ Formulasi Isu-isu Penting

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, aktivitas yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2026 antara lain :

No.	Program	Aktivitas yang perlu ditindaklanjuti
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) - Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa dalam rangka Membangun Karakter Anak Bangsa Yang Berjiwa Pancasila - Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Paskibraka dan Purnapaskibraka - Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan Paskibraka - Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) - Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Peningkatan Kesadaran Bela Negara - Peningkatan Kapasitas Bela Negara - Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) - Pemantapan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika - Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi pelajar dan Mahasiswa - Pemusatan Latihan dan Penguatan Paskibraka - Pembinaan Kepaskibrakaan Dalam Rangka Pengibaratan Bendera Hari-Hari Nasional



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none">- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memiliki Keterwakilan Di DPRD Kota Samarinda- Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender- Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi- Meningkatkan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan- Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan Upacara / Apel
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kerukunan Umat Beragama- Dialog Interaktif- Peningkatan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika- Pelaksanaan Dialog Membangun Semangat Cinta Seni Dan Budaya- Pelaksanaan Silaturahmi Pemerintah Daerah Dengan Pemuka Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Samarinda
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Peta Rawan Konflik- Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme di Kota Samarinda- Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat Kota Samarinda- Peningkatan Pencegahan Tawuran- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten/Kota (Forkopimda)

2.4 Review terhadap Rancangan Renja RKPD

Proses yang dilakukan dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Proses tersebut merupakan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif dalam Rencana Kerja yang perlu ditinjau kembali sebelum ditetapkan dalam RKPD.

Berikut Hasil Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 Kota Samarinda (Terlampir : Tabel. 31)

Tabel. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10 Kecamatan di Samarinda	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,5 Nilai	11.486.678.147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10 Kecamatan di Samarinda	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,5 Nilai	14.651.126.250	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,8 Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,8 Nilai		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	243.730.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	250.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43.730.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	9.865.910.851	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	11.450.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	8.644.398.635	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	10.000.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	1.174.696.216	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	1.400.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	46.816.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%	250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 paket	60.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 paket	60.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	190.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	190.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	325.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	537.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	17.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	17.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	35.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	187.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	73.124.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	73.124.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	63.124.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	63.124.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%	238.411.046,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%	1.600.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	18.913.296	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	27.647.750	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Laporan	171.850.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Laporan	25.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	490.502.250	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	490.502.250	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	250.502.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	250.502.250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	10.000.000	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	230.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	230.000.000	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	2.421.161.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	2.831.191.762	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	900 Orang	2.421.161.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	900 Orang	2.831.191.762	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 Orang	278.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 Orang	506.090.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	95.286.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	225.101.762	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	5 Dokumen	148.125.000	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	5 Dokumen	1.800.000.000	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	300 Orang	1.803.000.000	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	300 Orang	200.000.000	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	80 Orang	96.250.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	80 Orang	100.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	5.277.910.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	6.102.519.121	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1200 Orang	5.277.910.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1200 Orang	6.102.519.121	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	3.850.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	2.200.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 orang	944.679.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 orang	2.402.519.121	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	483.231.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	1.500.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	263.728.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	550.000.000	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	160 Ormas	263.728.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	160 Ormas	550.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	125.440.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	275.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52 Laporan	138.288.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52 Laporan	275.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	1.284.255.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	1.322.005.000	Usulan Anggaran di Rasionalisasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45 Laporan	1.284.255.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45 Laporan	1.322.005.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	233.655.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	271.405.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	33 Laporan	1.050.600.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	33 Laporan	1.050.600.000	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	2.349.084.700	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	2.582.454.450	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 Kasus	2.349.084.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 Kasus	2.582.454.450	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	239.812.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	273.181.750	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	109.272.700	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	109.272.700	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2.000.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2.200.000.000	
Total					23.082.816.847	Total					28.039.296.583

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Review terhadap Rancangan awal RKP Tahun 2026 dengan hasil Analisis Kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sammarinda tahun 2026 terdapat beberapa perbedaan.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alasan
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.	Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan• Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka• Pembentukan Paskibraka	Untuk menunjang program prioritas daerah maka tidak terdapat penambahan anggaran pada kegiatan sosialisasi, monev, pembinaan Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dan pembentukan Paskibraka
3.	Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Untuk menunjang program prioritas daerah maka tidak terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dana hibah bantuan KPU dan Bawaslu, dan kegiatan pembinaan dan monev. Politik



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alasan
	<p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
4.	<p>Program : Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Untuk menunjang program prioritas daerah maka tidak terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pembinaan Ormas dan monev. Ormas
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alasan
5.	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Untuk menunjang program prioritas daerah maka tidak terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan movev.
6.	<p>Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Untuk menunjang program prioritas daerah maka terdapat pengurangan anggaran untuk kegiatan dan kegiatan pembinaan dan movev dan Forkopimda
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	



Dalam rangka percepatan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang dibebankan pada APBD dalam pembebanan belanja tidak langsung yang tidak mencukupi maka Pemerintah Kota Samarinda melakukan realokasi belanja pada beberapa Perangkat Daerah yang mengharuskan Perangkat Daerah melakukan refocusing anggaran. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 terdapat penyesuaian anggaran dengan Rencana Kerja RKPD tahun 2026 dan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan maka pagu indikatif Rancangan Awal RKPD lebih besar dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Dalam tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut diatas meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk program dan kegiatan. Adapun untuk besaran pagu anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah APBD Kota Samarinda yang mana diprioritaskan untuk pembangunan Kota Samarinda.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tidak ada usulan dari masyarakat. Berikut tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 Kota Samarinda:

Berikut Tabel Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Samarinda :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Tabel. 32

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja Program	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Samarinda	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Kegiatan ini diadakan untuk memperkuat rasa persatuan. Kesatuan dan Rasa Cinta Tanah Air
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1200 Orang	
2	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1200 orang	
3	PROGRAM Pemberdayaan DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah Ormas yang dibina	45 Ormas	
4	PROGRAM Pembinaan DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kebijakan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45 laporan	
5	PROGRAM Peningkatan KEWASPADAAN NASIONAL DAN Peningkatan KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 Persen	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 kasus	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan



peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan



14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui program prioritas nasional ke-16 yakni *Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.*

Selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, arah kebijakan dan strategi pembangunan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Politik merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan peraturan Walikota Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, adapun yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diantaranya :

1. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik.



Arah kebijakan dan pembangunan nasional juga harus bersinergi dengan arah kebijakan dan pembangunan provinsi khususnya provinsi Kalimantan Timur dimana terdapat prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan (Fasyankes) lainnya
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.
4. penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Ketujuh, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Adapun yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda antara lain :

1. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah untuk mendukung penilaian dalam WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
2. Melalui program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Tabel 3.1
 Keselarasan antara Prioritas Nasional, Provinsi Kaltim, Kota Samarinda dan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tingkat Prioritas	Prioritas
Prioritas Nasional	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Provinsi Kaltim	Peningkatan kualitas Keagamaan Masyarakat
Kota Samarinda	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025-2029, adapun tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Renstra
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025- 2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Misi : Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis												
Tujuan												
1	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial $= \frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}{5} \times 100$	66%	66,65%	71%	75%	78%	80%			
Sasaran												
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter	P1 = Persentase Program 1 P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5 P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100%	95%	96%	97%	98%	100%	100%			



	Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<p>P2 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Politik dibagi target peserta x 100%</p> <p>P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100%</p> <p>P4 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya dan agama dibagi target peserta di kali 100%</p> <p>P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat. yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Program Dan Kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terutama misi 4 yaitu *Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis*
 - Pencapaian SDGs, pada kegiatan pelayanan tidak membedakan Gender;
 - Pencapaian NSPK dan SPM, pada kegiatan pelayanan mengenai persyaratan, prosedur pembuatan, waktu layanan dan pengaduan layanan.
 - Strategi dan arah Kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029
 - Usulan Musrenbang dari Kecamatan dan Pokir DPRD Kota Samarinda.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Program yang direncanakan sebanyak 6 program
 - Kegiatan yang direncanakan sebanyak 12 kegiatan
 - Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 39 sub kegiatan



- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
Berdasarkan dengan usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD Kota Samarinda untuk kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
 - Total kebutuhan dana / pagu indikatif
Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk tahun 2026 yang diinput pada Aplikasi SIPD RI Kemendagri adalah Rp. 21.446.218.214,- bersumber dari APBD Kota Samarinda untuk menunjang kegiatan yang menjadi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 243.730.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 250.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.
Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 9.865.910.851,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 11.450.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.
Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 250.000.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 250.000.000,-
Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 325.000.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 537.500.000,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.



Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 73.124.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 73.124.000,-.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 238.411.046,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 1.600.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 490.502.250,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 490.502.250,-.

2. Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 2.421.161.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 2.831.191.762,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.
3. Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 5.277.910.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 6.102.519.121,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.



4. Pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 263.728.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 550.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.
5. Pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 1.284.255.000,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 1.322.005.000,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.
6. Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 2.349.084.700,- sedangkan rencana usulan yang ada pada Renstra tahun anggaran 2026 menjadi Rp. 2.582.454.450,- dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas pemerintah Kota Samarinda.

Secara keseluruhan terdapat perbedaan pagu anggaran dari rancangan awal RKPD sebesar Rp. 23.082.816.847,- Menjadi rencana usulan yang ada di Renja SIPD RI tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 21.746.218.214,- selisih anggaran sebesar Rp.1.336.598.633,-

Berikut Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 (Terlampir : Tabel. 33)

Tabel.33
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Kota Samarinda	80,5 Nilai	9.054.716.309	APBD		80,5 Nilai	15.242.500.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,8 Nilai				76,8 Nilai	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP		100%	250.000.000			100%	300.000.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	75.000.000			5 Dokumen	150.000.000
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	75.000.000			1 Laporan	50.000.000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	50.000.000
8.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Berita Acara	50.000.000			4 Berita Acara	50.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu		100%	7.396.716.309			100%	11.450.000.000
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 orang/bulan	6.172.020.093			65 orang/bulan	10.000.000.000
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40 dokumen	1.174.696.216			40 dokumen	1.400.000.000
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	50.000.000			5 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian		100%	100.000.000			100%	220.000.000
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100 paket	50.000.000			100 paket	120.000.000
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	50.000.000			20 orang	100.000.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		100%	402.000.000			100%	642.500.000
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12 Paket	10.000.000			12 Paket	27.500.000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12 Paket	100.000.000			12 Paket	200.000.000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		5 paket	10.000.000			5 paket	20.000.000
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		5 paket	30.000.000			5 paket	25.000.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 paket	35.000.000			12 paket	35.000.000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		4 dokumen	5.000.000			4 dokumen	10.000.000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 laporan	12.000.000			4 laporan	25.000.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	200.000.000			30 Laporan	300.000.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang		100%	115.000.000			100%	155.000.000
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2 Unit	15.000.000			2 Unit	105.000.000
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		12 unit	100.000.000			12 unit	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP		100%	321.000.000,00			100%	1.865.000.000
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.000.000			12 Laporan	10.000.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Laporan	20.000.000			36 Laporan	50.000.000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12 Laporan	100.000.000			12 Laporan	1.500.000.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		10 Laporan	200.000.000			10 Laporan	305.000.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		100%	470.000.000			100%	610.000.000
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	300.000.000			18 Unit	300.000.000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara		12 Unit	20.000.000			12 Unit	60.000.000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	150.000.000			1 unit	250.000.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Samarinda	100%	3.000.000.000	APBD		100%	4.000.000.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		900 Orang	3.000.000.000			900 Orang	4.000.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		900 Orang	500.000.000			900 Orang	600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		8 Laporan	100.000.000			8 Laporan	300.000.000
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		5 Dokumen	500.000.000			5 Dokumen	400.000.000
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		300 Orang	1.800.000.000			300 Orang	2.500.000.000
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.		80 Orang	100.000.000			80 Orang	200.000.000
	Tour and Travel di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kunjungan							2.000.000.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Kota Samarinda	100%	5.691.501.905	APBD		100%	4.150.000.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		1200 Orang	5.691.501.905			1200 Orang	4.150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		10 Dokumen	4.941.501.905			10 Dokumen	2.650.000.000
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2500 orang	500.000.000			2500 orang	1.000.000.000
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Laporan	250.000.000			12 Laporan	500.000.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	Kota Samarinda	100%	650.000.000	APBD		100%	550.000.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas yang dibina		60 Ormas	650.000.000			60 Ormas	550.000.000
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		600 Orang	400.000.000			600 Orang	275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		60 Laporan	250.000.000			60 Laporan	275.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Kota Samarinda	100%	1.400.000.000	APBD		100%	1.322.005.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		45 Laporan	1.400.000.000			45 Laporan	1.322.005.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		600 Orang	200.000.000			600 Orang	271.405.000
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		33 Laporan	1.200.000.000			33 Laporan	1.050.600.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kota Samarinda	100%	1.950.000.000	APBD		100%	2.905.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani		24 Kasus	1.950.000.000			24 Kasus	2.905.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		600 Orang	400.000.000			600 Orang	275.000.000
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		14 Laporan	150.000.000			14 Laporan	130.000.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		13 Dokumen	1.400.000.000			13 Dokumen	2.500.000.000
TOTAL					21.746.218.214	TOTAL		28.169.505.000	

CATATAN : Kalau kita sesuaikan dengan RKPD sebanyak duabelas (12) Kegiatan

Sementara kolom yang ada memuat Prakiraan maju tahun 2027 (12 Kegiatan)

DiRKPD pada kolom terakhir sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor **ada**

DiRKPD pada kolom terakhir sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **ada**



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda termasuk dalam program prioritas Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang dijabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA).

Program yang menjadi prioritas dapat menjadi tolak ukur indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Capaian indikator kinerja ini merupakan data-data informasi dalam menentukan kebijakan baik dalam perencanaan anggaran maupun masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat saat ini.

Perencanaan anggaran dan pendanaan indikatif didasarkan pada program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik bersumber dari APBD Pemerintah Kota Samarinda, APBD Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun APBN.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 6 (enam) Program;
3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 12 (dua belas) Kegiatan;
4. Jumlah Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026 dengan total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Adalah Sebesar **Rp. 21.746.218.214,-**. Dengan Rincian Sebagai Berikut, **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Sebesar **Rp. 9.054.716.309,-**. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** Sebesar **Rp. 3.000.000.000,-**. **Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** Sebesar **Rp. 5.691.501.90,-**. **Program**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sebesar Rp. 650.000.000,-. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Sebesar Rp. 1.950.000.000,-.

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang telah diinput di SIPD RI
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Tahun 2026

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA						21.746.218.214,00								28.169.505.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						21.746.218.214,00							28.169.505.000,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						21.746.218.214,00							28.169.505.000,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.054.716.309,00						-	15.242.500.000,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.396.716.309,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	11.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				65 Orang/bulan	6.172.020.093,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				40 Dokumen	1.174.696.216,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	402.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	642.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	35.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	155.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				12 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	321.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	1.865.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		305.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	470.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	-	610.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizihannya</i>				18 Unit	300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	3.000.000.000,00						-	4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	3.000.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	4.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				900 Orang	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				8 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				300 Orang	1.800.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				80 Orang	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	5.691.501.905,00						-	4.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	5.691.501.905,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	4.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				10 Dokumen	4.941.501.905,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		2.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				2500 Orang	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				12 Laporan	250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	650.000.000,00						-	550.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	650.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				600 Orang	400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				60 Laporan	250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	1.400.000.000,00						-	1.322.005.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	1.400.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	1.322.005.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				600 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		271.405.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				33 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		1.050.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.950.000.000,00						-	2.905.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	1.950.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	2.905.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				1500 Orang	400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				14 Laporan	150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				13 Dokumen	1.400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
J U M L A H								21.746.218.214,00							28.169.505.000,00	



BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan pemerintahan umum yang mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun 2025, dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kta Samarinda tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam program prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2025, yang memuat arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut.

Perencanaan yang meliputi penyusunan dan penetapan, tahapan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana diselenggarakan secara tepat syarat. Untuk memudahkan pembuktian kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan termuat dalam penjabaran RKA dalam pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian progamnya. Pelaksanaan tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda di tahun 2026.



b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Prioritas Anggaran, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan kerja tersebut ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dan seluruh Stakeholders pembangunan/pihak-pihak terkait untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
3. Sebagai upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda perlu membuat Rencana Kerja.
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda serta Prioritas dan Pagu Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda Tahun 2026, disusun untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.



c. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, bukan semata memanfaatkan sumberdana saja melainkan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang ada dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk itu dibutuhkan rencana tindak lanjut terhadap Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda :

1. Mengevaluasi ulang hasil-hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan mempertahankan capaian-capaian positif indikator masing-masing kegiatan dan meningkatkan hasil (output)nya.
2. Memfokuskan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berorientasi pada hasil yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timely/Time bound);
3. Mengintensifkan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan maupun melalui Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dibuat kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Semoga upaya-upaya kita dalam meningkatkan kinerja pemerintah Kota Samarinda mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Samarinda, 3 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP., M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003